

PENGARUH FATWA ULAMA DAYAH DALAM MASYARAKAT ACEH

Nurlaila, Zulihafnani

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Aceh-Indonesia

Email: zulihafnani@gmail.com

Abstract: *Ulema* (Islamic scholar) in Acehnese society occupies the same status as an elite community. Besides teaching religion, ulema also serve functions in various rituals of community life, such as praying for the deceased, reconciling disputes, helping the distribution of inheritance, and leading customary processions in the community. In Acehnese society, ulema not only lead and teach religion but also play a role in the political field. Aceh has Ulema Consultation Council (MPU) to decide on all religious matters. However, the community is more obedient to the ulema around them even though their fatwas are not in the MPU's decision. Sometimes their fatwas are different from the MPU's. Since it is *Tengku* (Islamic scholar referred to in Aceh) in their network who decide, their opinions are obeyed. This article will examine how *Teungku* can influence the community in their network considering their fatwas do not have a binding power due to their unofficial status. This study was conducted using a qualitative approach. Some initial data information on the ulema network was obtained through study documentation in several districts in Aceh. The findings show that the fatwas of *Tengku* bind and the community obey their fatwas, for they are not aware of the Ulema Consultation Council. According to the community, MPU is absent and does not exist when needed. Furthermore, as an independent institution in deciding religious issues, MPU has not been socialized to the village level.

Abstrak: Dalam masyarakat Aceh, posisi ulama sama halnya dengan masyarakat elite di sebuah tempat. Selain mengajar agama, ulama juga berfungsi dalam beragam ritual kehidupan masyarakat. Seperti mendoakan dan menshalatkan jenazah, mendamaikan yang berseteru, membantu pembagian harta warisan, memimpin prosesi-prosesi adat dalam masyarakat, dan lainnya. Kiprah ulama dalam lintas sejarah masyarakat Aceh bukan hanya sebagai pemimpin dan pengajar di bidang agama. Akan tetapi, ulama juga memainkan peran dalam berbagai lini kehidupan masyarakat termasuk dalam bidang politik. Meskipun secara legal formal, Aceh memiliki lembaga MPU untuk memutuskan segala masalah keagamaan. Namun, fenomena yang terjadi masyarakat lebih mematuhi ulama di sekitarnya meskipun tidak ada dalam keputusan MPU. Tidak jarang fatwa tersebut berbeda dengan fatwa MPU, namun karena yang memutuskan adalah *teungku* dalam jaringannya maka pendapat merekalah yang dipatuhi. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana peran aktor “*teungku*” dapat mempengaruhi masyarakat dalam jaringannya, meskipun fatwa tersebut tidak mengikat karena bukan lembaga resmi. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informasi sebagian data awal mengenai jaringan ulama diperoleh melalui studi dokumentasi pada beberapa kabupaten di Aceh. Hasil kajian menunjukkan bahwa fatwa ulama dayah menjadi fatwa yang mengikat dan dipatuhi karena masyarakat tidak mengetahui tentang lembaga ulama yang ada di pemerintahan seperti MPU. Menurut masyarakat, MPU tidak hadir dan tidak ada pada saat dibutuhkan. MPU pun sebagai lembaga independen dalam memutuskan masalah agama belum tersosialisasi sampai ke tingkat bawah (desa).

Kata Kunci: *Pengaruh, Fatwa; Ulama Dayah; Aceh*

Pendahuluan

Di Aceh, ulama dianggap sebagai manusia keramat. Pusara ulama tidak jarang dijadikan sebagai tempat untuk ritual nazar dan beragam ritual keagamaan dan hajatan lainnya. Jarang atau bahkan tidak ada pusara seorang pemimpin atau raja dijadikan untuk tempat bernazar. Di lain pihak, ulama sebagai pengayom masyarakat tidak pernah kehilangan ide dalam memperjuangkan dan meningkatkan kualitas hidup umat. Seperti mengajarkan agama tanpa tuntutan bayaran, terkadang mereka sendiri yang membiayai berbagai fasilitas untuk belajar-mengajar bagi masyarakat. Selain itu, ulama juga berfungsi dalam beragam daur hidup dalam kehidupan masyarakat seperti mendoakan dan menshalatkan jenazah, mendamaikan perselisihan dalam masyarakat, menyelesaikan masalah warisan. Demikian juga pada prosesi-prosesi adat dalam masyarakat mulai dari perkawinan, *peutroen aneuk* (menurunkan bayi ke tanah), *peucicap aneuk* (makan pertama kali pada bayi) hingga pemberian nama pada anak pun melibatkan ulama. Hal ini menandakan keberadaan ulama dalam masyarakat masih sangat dibutuhkan.

Pada wilayah ini, ulama disebut "*teungku*". Seseorang dapat disebut *teungku* apabila ia telah belajar di dayah atau rangkang (bahasa Jawa: Pesantren) yang jauh dari tempat kelahirannya. Seseorang tidak menjadi *teungku* dengan hanya belajar agama di tempat kelahirannya saja, namun ia harus berangkat dari dayah ke dayah lainnya untuk memperoleh ilmu dari gurunya. Bahkan, jika memungkinkan ia juga berangkat ke Mekkah dalam rangka mendalami ilmunya.¹ Dengan berpindah dari satu dayah ke dayah lainnya dalam rangka menuntut ilmu agama, calon *teungku* tentu saja memperoleh beragam pengalaman yang membuatnya menjadi lebih matang dalam berpikir dan dalam mengambil tindakan dalam masyarakat.

Snouck Hurgronje mengatakan bahwa para *teungku* di Aceh telah mengambil peran yang sangat penting dalam bidang politik, dibandingkan sebagai ahli agama atau kehidupan sufi. Hampir 70 tahun peperangan Aceh menentang Belanda dimotori oleh *teungku*, tidak terkecuali pada masa Jepang. Kedua peristiwa penting ini memperlihatkan betapa peran ulama dalam bidang politik tidak dapat dinafikan.²

Hasil dan Pembahasan

Organisasi Ulama di Aceh

Pada awal tahun 1900-an, Belanda mengeluarkan kebijakan dengan membentuk politik etis terhadap warga pribumi, yaitu suatu kebijakan yang diberikan kepada masyarakat pribumi untuk disekolahkan. Akibatnya, banyak penduduk pribumi yang pandai, hingga kemudian banyak masyarakat pribumi membentuk berbagai organisasi, di antaranya adalah organisasi NU (Nahdhatul Ulama) pada tahun 1926 di pulau Jawa. Organisasi ini kemudian menyebar ke seluruh Indonesia tak terkecuali Aceh. Dalam perjalanannya, organisasi NU di Aceh tidaklah berkembang pesat sebagaimana di Jawa. Menurut tulisan Otto Iskandar dalam

¹James L. Peacock, *Indonesia: An Antropological Perspective*, (California: Good Year Publishing Company), 24

²Snouck Hurgronje, *Aceh Dimata Kolonialis*, jilid I, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), 165

sebuah tulisan, ia mengatakan bahwa NU di Aceh tidak berperan karena di Aceh tidak ada kiyai sebagaimana di Jawa, di Aceh yang ada adalah *teungku*.³

Organisasi ulama yang pertama sekali terbentuk di Aceh adalah PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939. Kiprah lembaga PUSA selain berorientasi untuk mengembangkan pendidikan di Aceh juga memainkan peran di bidang politik dalam rangka mengusir Belanda dari Aceh. Peran politik yang dilancarkan adalah dengan melakukan diplomasi dengan pihak Jepang di Malaysia, agar Jepang bisa masuk ke Aceh dan mengusir Belanda, sehingga ada ungkapan "*Ulama PUSA peutamong Jeupang Panglima Tibang teurimong Belanda*". Namun, prediksi terhadap Jepang salah, awalnya dianggap sebagai penolong namun kemudian berubah menjadi penjajah. Pihak ulama dalam hal ini PUSA juga ikut melakukan perlawanan terhadap Jepang.

Setelah PUSA bubar muncul lembaga-lembaga lain seperti PERTI, Nahdhatul Ulama, al-Washliyah, Muhammadiyah, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada tahun 1965 Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17-18 Desember 1965 di Banda Aceh bersepakat untuk membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Ketua Umum pertama dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba. Saat itu, MPU terdiri dari pimpinan, badan pekerja, komisi dan panitia khusus. Komisi terdiri atas 5 (lima) bagian, yaitu: Komisi Ifta; Komisi Penelitian dan Perencanaan; Komisi Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; Komisi Dakwah dan Penerbitan serta Komisi Harta Agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU Kabupaten/Kota dan MPU Kecamatan. Dengan adanya penyeragaman nama lembaga ulama seluruh Indonesia yaitu MUI, maka untuk organisasi MPU di Aceh juga berganti nama dengan MUI.

Kedudukan MUI Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan "Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri dari Ulama". Dalam ayat (2) ditegaskan lagi "Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami".⁴

Secara organisasi, ulama di Aceh terbentuk dalam organisasi NU. Kemudian HUDA (Himpunan Ulama-ulama Dayah Aceh), organisasi ini merupakan suatu himpunan ulama dayah salafi dari seluruh Aceh. Insafuddin yang lebih konsern dalam hal pendidikan dan RTA (Rabithah Thaliban Aceh) merupakan kumpulan murid-murid yang belajar di dayah salafi.

Pasca Perdamaian di Aceh, lahir salah satu entitas organisasi ulama yaitu MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh). Secara politik, organisasi ulama ini diasumsikan oleh banyak orang berafiliasi pada salah satu partai politik lokal di Aceh. MUNA didirikan setelah

³<http://OttoIskandar.blog.org/> Kiprah NU

⁴Sumber data dari sejarah MPU di Aceh dan juga wawancara dengan anggota MPU Aceh, Tgk. Tarmizi, tanggal 12 September 2018

MoU Helsinki atau setelah perdamaian antara pemerintah RI-dengan GAM pada tahun 2006. Menurut pengurus partai Politik Aceh (PA), lembaga ini pada awalnya mempunyai tujuan jika Aceh berhasil menjadi wilayah merdeka, lembaga ini akan menjadi lembaga resmi negara seperti MUI-nya Indonesia. Namun, karena tidak merdeka maka lembaga ini tetap menjadi lembaga ulama tempat para politisi untuk meminta beragam fatwa keagamaan. Komposisi dari keanggotaan MUNA terdiri dari para ulama dengan latar belakang dari pesantren, dan mereka memiliki visi yang sama dengan partai PA. Ulama dalam organisasi ini tidak ada hubungan dengan HUDA, RTA atau Insafuddin.⁵

Peran Ulama

Jaringan ulama di Aceh tidak hanya terhimpun dalam bentuk dalam suatu organisasi saja, namun juga terbentuk dalam jaringan yang terlepas dari organisasi tertentu. Mereka sangat dipercayai dan dipatuhi oleh masyarakat dalam berbagai hal termasuk untuk mengeluarkan fatwa-fatwa tertentu dalam masyarakat. Meskipun ulama tersebut berada di luar sebuah atau tidak terikat dengan organisasi tertentu. Jaringan ulama dalam masyarakat Aceh terbentuk tidak lepas dari suatu konsep untuk menunjukkan pada suatu hubungan sosial, diikat oleh adanya kepercayaan yang dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada dasarnya, jaringan sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu.

Jaringan ulama juga terbentuk dengan adanya suatu hubungan karena mempunyai suatu kepercayaan dan norma-norma yang sama. Kepercayaan pada norma yang sama juga tidak terlepas dari paham dan mazhab yang sama. Dalam realitasnya, jaringan ini ada karena berasal dari institusi yang sama latar belakang, guru, dan sama prinsip yang berada di lingkungan yang juga sangat fanatik terhadap mazhabnya. Dengan beberapa faktor ini, terbentuk suatu jaringan tersendiri yang selanjutnya menjadi figur dan aktor yang berpengaruh dalam masyarakat.

Jika berkaca pada sejarah Aceh, hubungan antar ulama memang pernah tidak harmonis karena perbedaan mazhab dan keyakinan dalam berislam. Hal ini terjadi pada zaman kejayaan Aceh masa Kesultanan Iskandar Tsani dengan qadhinya ar-Raniry. Dalam peristiwa tersebut, ar-Raniry pernah menuduh sesat terhadap pengikut Hamzah Fansuri yang berkeyakinan *panteisme* atau *wahdatul wujud*. Setelah tuduhan tersebut, terbentuk dalam masyarakat Aceh jaringan ulama menurut keyakinan masing-masing. Di satu pihak ada jaringan pengikut ulama ar-Raniry dan di pihak lain ada pengikut jaringan ulama pengikut jaringan Hamzah Fansuri.

Pada era pemerintahan selanjutnya yaitu masa Sulthanah Ratu Safiatuddin sekitar tahun 1643 M, pernah terjadi rekonsiliasi antara keduanya dan disatukan oleh seorang qadhi yang sangat berpengaruh yaitu Syekh Abdur Rauf as-Singkili yang dikenal dengan Teungku Syiah Kuala. Sehingga, pemahaman keagamaan dan keyakinan yang diikuti oleh masyarakat berdasarkan paham dan mazhab yang diajarkan oleh ulama ini. Abdurrauf juga mengarang buku yang menjadi panutan seluruh pemuka agama di Aceh, sehingga sampai terkenal

⁵Wawancara dengan Tgk. Hasballah, pada tanggal 20 Agustus 2018, pengurus PA Aceh Besar

adagium atau pepatah “*adat bak poe teumerehom, hukom bak Syiah Kuala, qanun bak putro phang reusam bak laksamana*” yang artinya adat pada raja, hukum pada Teungku Syiah Kuala, qanun pada putri Pahang, dan reusam pada panglima.⁶

Sepeninggal Abdurrauf, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Aceh saat itu tidak lagi memiliki ulama dengan figur seperti Syiah Kuala yang dapat menyatukan dan menyeragamkan mazhab beragama di Aceh. Dari segi politik, kerajaan Islam Darussalam terus mengalami kemunduran karena berbagai faktor, di antaranya adalah perebutan kekuasaan di istana. Karena politik terus merosot, figur ulama yang dapat menyatukannya pun tidak ada lagi. Dalam bidang agama, dibuka dan dihidupkan lembaga pengajian agama atau yang dikenal dengan dayah di setiap daerah di seluruh Aceh. Dayah-dayah yang didirikan tersebut tidak dipungkiri menciptakan figur ulama tersendiri di setiap daerah, terutama daerah yang mempunyai dayah besar. Figur ulama dari dayah tersebut yang terus berjaya menjadi figur yang dipatuhi dalam masyarakat setempat.

Pada saat terjadinya perang dengan kolonial, figur ulama menjadi panutan karena mereka juga turut berperang dengan rakyat Aceh melawan Belanda. Pada masa tersebut, figur ulama terkesan disatukan oleh seorang ulama besar Teungku Muhammad Saman atau dikenal dengan Teungku Syik Ditiro sebagai komando perang di Aceh. Setelah meninggal karena diracuni oleh pihak Belanda, perang terus berlanjut dalam bentuk gerilya. Perang gerilya tersebut dipimpin oleh figur ulama di daerah masing-masing. Setelah kalangan Ulee Balang menyerah kepada Belanda, semangat rakyat semakin lemah. Namun, ulama dan rakyat tetap melancarkan penyerangan, meski intensitasnya menurun karena pihak musuh membunuh ulama yang terlibat dalam membangkitkan semangat untuk berperang.

Melihat kondisi bahwa berperang melawan Belanda dengan perlawanan fisik semakin tidak memungkinkan, maka tokoh-tokoh ulama pun mengubah cara perlawanan yaitu dengan membentuk organisasi ulama. Ulama di seluruh Aceh membentuk sebuah wadah organisasi khusus yang menghimpun ulama-ulama di seluruh elemen masyarakat dalam sebuah wadah yang diberi nama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939. Visi dan misi pembentukan wadah tersebut pada awalnya adalah untuk kembali meningkatkan peran pendidikan Islam dalam masyarakat Aceh yang sebelumnya sibuk berperang. Di lain pihak, di Aceh saat itu telah berdiri lembaga pendidikan modern yang dibentuk oleh Belanda. Pada masa ini, juga sudah ada ormas Muhammadiyah yang memperkenalkan sistem pendidikan madrasah yaitu perpaduan pendidikan Islam dan pendidikan modern.

Berdirinya PUSA tidak terlepas dari figur-figur ulama karismatik dari beberapa daerah pada masa itu. Namun, periode atau era yang sangat menonjol pada saat PUSA dipimpin oleh seorang ulama karismatik bernama Teungku Daud Beureueh. Ia merupakan figur ulama karismatik yang dapat menyatukan seluruh ulama di setiap daerah. Sebagai sebuah organisasi, kepemimpinan PUSA diwakili oleh pimpinan di setiap daerah di Aceh. Sosok yang memimpin PUSA adalah figur ulama karismatik suatu daerah setempat, yang ulama tersebut mempunyai lembaga dayah masing-masing.

⁶M. Adli Abdullah, *Membedah Sejarah Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2011), 38-45

Sebagai sebuah organisasi, PUSA memang tidak bertahan lama karena lembaga ini terlibat dalam pergulatan politik praktis dan figur ulama karismatik yang menjadi pemersatu terlibat dalam organisasi yang menentang pemerintahan yaitu DI/TII pada tahun 1956. Oleh karena itu, figur ulama sebagai sosok pemersatu seluruh ulama pun merosot, yang terjadi kemudian adalah terbentuknya figur-figur ulama tersendiri di setiap daerah.

Munculnya figur ulama tersendiri di setiap daerah di seluruh Aceh tidak terlepas dari keberadaan sebuah lembaga dayah sebagai pusat pengajian dan pendidikan Islam. Sosok dan figur ulama karismatik tercipta karena dayah yang dipimpinya berkembang dan semakin banyak orang yang menuntut ilmu sehingga keberadaan ulama tersebut makin dikenal. Namun, ada juga sosok ulama yang dijadikan sebagai panutan tidak mendirikan lembaga dayah secara formal, tetapi pengajaran dan pemahamannya sama dan sepaham dengan masyarakat atau dayah tertentu. Ada juga figur ulama yang dijadikan sebagai panutan karena ulama tersebut mempunyai kelebihan lain, seperti memiliki kemampuan untuk pengobatan dan dapat menyembuhkan warga. Jaringan ulama yang terbentuk dalam masyarakat sekarang ini umumnya adalah karena berasal dari suatu lembaga dayah yang sama organisasi, mazhab, dan sama guru.

Bentuk-bentuk jaringan ulama tersebut terjadi dan sangat ditentukan oleh alumni. Alumni dayah memegang peran penting untuk terbentuknya jaringan ulama dalam masyarakat. Alumni dan santri menjadi aktor penentu dalam menyebarkan dan mensosialisasikan jaringan ulama. Para saat alumni membuka pengajian atau dayah baru di daerahnya, mereka akan melabelkan nama tempat atau dayah baru tersebut dengan nama yang merujuk kepada dayah induk. Sebagai contoh, jika mereka adalah alumni dari Dayah Budi Mesra, di akhir nama dayah baru menambahkan nama Aziziyah, sebagai suatu ciri khas dari Dayah Budi Mesra. Begitu juga dengan Dayah Ruhul Fata Seulimum di Aceh Besar termasuk salah satu dayah terbesar di Aceh Besar. Para alumni yang mendirikan dayah di tempat lain akan menambah nama Fata di belakang dayah baru yang mereka dirikan. Hal ini membuktikan bahwa para alumni sangat mengagumi dan menjaga jaringan dengan dayahnya masing-masing.⁷

Teungku atau ulama merupakan orang pertama yang akan dipanggil bila ada yang meninggal. Bahkan peran *teungku* atau ulama dimulai sebelum seseorang meninggal. Kehadiran ulama sangat berperan mulai dari memandikan sampai menguburkan jenazah, dan yang akan memimpin doa sampai hari ke 100, yang dinamakan dengan tahlil. Di samping itu, ulama akan selalu diharapkan kehadirannya untuk berdoa pada acara hajatan masyarakat seperti hajatan masuk rumah baru, acara lulus sekolah, aqiqah, dan semua hajatan lainnya.

Sebagai tokoh masyarakat, ulama juga akan hadir dalam berbagai sengketa masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat konflik dan sengketa tidak bisa dihindari terjadi, mulai dari masalah yang terjadi dalam rumah tangga sampai konflik yang berat

⁷Wawancara dengan Teungku Hannan, salah seorang alumni Budi Mesra Samalanga pada tanggal 15 Agustus di Bireun.

semuanya melibatkan ulama sebagai juru damai. Keterlibatan ulama sebagai juru damai masih sangat dibutuhkan dalam masyarakat.

Bagi sebagian masyarakat, nama anak yang baru lahir tidak diberikan nama sendiri, tapi diminta kepada ulama. Pemberian nama anak oleh sembarangan orang ditakutkan anak tersebut kelak pada saat besar sifat dan wataknya seperti yang memberikan nama. Maka, supaya anaknya mempunyai akhlak yang baik ketika dewasa maka pemberian nama anak akan diserahkan pada ulama atau pada *teungku* dilingkungannya. Biasanya pemberian nama sekaligus dengan perayaan aqiqah bila si anak dilaksanakan acara aqiqah.

Pembagian harta warisan dalam masyarakat juga melibatkan ulama, karena mereka merupakan orang yang lebih paham tentang pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dalam masyarakat kerap menimbulkan konflik, maka kehadiran ulama dalam proses membagikan harta warisan warga merupakan suatu hal yang sangat ditunggu.⁸ Terkadang ulama juga menjadi tempat untuk mengobati penyakit tertentu. Masyarakat meminta untuk didoakan atau dengan hanya memberikan air yang sudah dibacakan doa untuk mengobati penyakit tertentu yang mungkin secara medis tidak bisa disembuhkan.

Pengaruh Fatwa Ulama Dayah

Dalam konteks sekarang, di Aceh terdapat berbagai macam lembaga pendidikan, mulai lembaga yang modern sampai lembaga tradisional. Semua lembaga pendidikan tersebut mempunyai pengaruhnya masing-masing pada masyarakat. Lembaga dayah sebagai sebuah lembaga pendidikan tradisional mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Aceh. Pemimpin dayah yang disebut dengan *teungku* juga berpengaruh bagi masyarakat Aceh.

Eksistensi Dayah di Aceh terdapat berbagai tipe dan kelas dan sudah dibentuk lembaga khusus yang berwenang untuk mengelola dayah-dayah di Aceh dengan nama Badan Dayah Aceh. Badan dayah mempunyai program peningkatan sarana dan prasarana dayah. Sasaran dari program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan memperbaiki sarana dan prasarana dayah yang ada di Aceh sehingga dapat tercipta dayah sehat yang mendukung kegiatan belajar santri dengan nyaman. Program lainnya adalah peningkatan mutu tenaga pendidikan dayah, sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik melalui peningkatan kompetensi guru dayah. Demikian juga, program pemberdayaan santri dayah, dimaksudkan untuk memberikan keterampilan hidup kepada santri dayah. Dengan adanya badan dayah, diharapkan ke depan dayah semakin berkembang dalam segala bidang, tidak hanya bidang agama saja. Memang belum semua dayah mendapat dana bimbingan dari pemerintah, karena banyak dayah yang harus mengelola dayah dari dananya sendiri.

Ada atau tidak adanya dukungan dari pemerintah, dayah-dayah di Aceh terus berkembang dan figur ulama dayah sangat berpengaruh dalam masyarakat. Pengaruh dari ulama dayah bagi masyarakat Aceh terjadi dalam berbagai lini kehidupan. Termasuk dalam pengeluaran fatwa terhadap sesuatu, ulama akan langsung mengeluarkan fatwa sesat, bila

⁸Wawancara dengan ibu Mardhiah dan ibu Rohana warga desa Lamsie Aceh Besar pada tanggal 25 Agustus 2018

ada masalah yang tidak sepele dengan mereka. Sejatinya, hal tersebut mestinya adalah wewenang lembaga resmi yang dimiliki oleh pemerintah yaitu MPU. Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah untuk mengawal masalah keagamaan dalam masyarakat. Namun, dalam implementasinya fatwa ulama dayah lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan lembaga resmi pemerintah seperti.

Setelah dilakukan kajian di dua lokasi yaitu di Aceh, masyarakat mempunyai alasan tersendiri kenapa figur ulama dayah lebih dipatuhi dan dijadikan sebagai panutan dibandingkan dengan lembaga resmi pemerintah. Di antaranya, karena ulama memiliki kharisma disebabkan ilmu mereka dan ada kewajiban untuk patuh kepada guru. Di setiap daerah atau desa di Aceh, ada ulama yang diidolakan oleh masyarakat, sosok idola ini disebut dengan istilah *teungku*. *Teungku* dalam suatu desa mempunyai jabatan struktural. Bahkan, untuk jabatan ini diberikan imbalan (honor) setiap bulan oleh pemerintah sekitar Rp 600.000/bulan.⁹

Di wilayahnya, *teungku* menjadi imam Shalat di *meunasah* (baca: surau), imam mesjid dan Shalat Jumat, menjadi guru mengaji untuk orang tua dan anak-anak. Karena kedudukan ulama tersebut sangat sentral bagi masyarakat, maka ulama menjadi panutan. Ketika menjadi panutan, semua yang dikatakan oleh ulama tersebut akan dibenarkan dan akan menjadi sebuah fatwa yang dipatuhi.

Dalam masyarakat Aceh, takzim atau patuh pada guru merupakan suatu keharusan karena keberkahan ilmu yang didapat karena adanya takzim pada guru. Mengenai hal ini, ada istilah atau *hadih maja* yang mengatakan *takzim keu guree meuteume ijazah, takzim keu nambah meuteume hareuta*, yang artinya, takzim pada guru mendapatkan ijazah dan takzim pada majikan mendapat harta. Dayah menempatkan takzim sebagai kunci keberkahan ilmu. Takzim yang dimaksudkan adalah kepatuhan total tanpa bantahan terhadap apa yang dikatakan oleh guru. Dengan adanya tradisi ini, terjadi suatu ikatan yang tidak boleh dilanggar. Takzim menjadi suatu upaya “kontrak sosial” yang tidak terlihat, di mana dengan kontrak tersebut guru memiliki kuasa dalam mengarahkan, menerangkan, dan memerintahkan murid.¹⁰

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam tradisi dayah, pendiri dayah adalah orang yang sangat disegani dan karismatik. Karisma pendiri dayah sebagai orang yang sangat berjasa akan diturunkan pada generasi selanjutnya. Konon lagi, jika pendiri dayah juga pernah ikut berperang melawan penjajah. Bahkan, ada pendapat ketika berperang sebagian dari ulama tersebut tidak dapat dilihat oleh musuh. Penilaian yang mengandung mitos ini dijaga dan akan terus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dengan adanya pendapat ini, masyarakat semakin mengagungkan para gurunya. Selain sangat bangga pada pendiri dayah dan akan diwarisi pada setiap generasi, dalam tradisi dayah juga terdapat figur tunggal yang menjadi idola. Figur tunggal tersebut adalah ulama yang sedang memimpin dayah. Semua kebijakan

⁹Wawancara dengan Tgk. Kamaruddin, salah seorang *teungku* di salah satu desa di Aceh Besar pada tanggal 4 Agustus 2018

¹⁰Wawancara dengan Teungku Hamdani, salah seorang guru mengaji di Desa Lamaling Aceh Besar pada Tanggal 15 Agustus 2018

dan keputusan ada di tangan pemimpin dayah tersebut, hingga tercipta figur tunggal yang disegani dan dipatuhi.

Apabila di suatu daerah ada ulama yang sudah menjadi ulama karismatik yang dipercaya oleh masyarakat berasal dari pesantren tertentu, maka kehadiran dan kedudukan alumni akan mudah diterima oleh masyarakat, karena berasal dari pesantren yang sama dengan *teungku* yang sudah ada. Ketika alumni berdakwah pada masyarakat, akan lebih mudah diterima dan umumnya akan diterima tanpa prasangka apa pun.

Jaringan ulama dalam masyarakat terbentuk apabila ulama tersebut bermazhab yang sama atau mempunyai ide yang sama dengan *teungku* atau ulama yang pernah ada di tempatnya. Karena bila ada yang berbeda walaupun dalam hal *furu'* tetap tidak bisa diterima.¹¹ Sebab-sebab masyarakat sangat terikat dengan ulama dalam jaringan di sekitarnya adalah karena *teungku* atau ulama memiliki ilmu agama yang lebih dari masyarakat pada umumnya.

Keberadaan ulama juga di dukung oleh pemerintah. Pemimpin politik dalam masyarakat juga turut memberikan suatu andil tertentu dalam menjaga karismatik ulama. Pihak pemimpin kerap memakai ulama sebagai penasihatnya. Sudah menjadi rahasia umum bila ada politikus yang akan mencalonkan diri sebagai calon legislatif atau eksekutif, mereka akan datang menemui ulama. Sebagian misinya secara tak langsung dengan alasan silaturahmi. Namun, ada juga yang terang-terangan meminta dukungan untuk dipilih. Mengingat ulama atau *teungku* menjadi panutan, maka jika *teungku* meminta atau menyuruh memilih seseorang, maka murid akan ikut.

Dengan begitu banyaknya fungsi dan kedudukan ulama bagi masyarakat, maka tidak heran jika fungsi ulama masih sangat sentral bagi warga, sehingga apa kata ulama di sekitarnya atau dalam jaringannya merupakan sebuah fatwa yang harus dipatuhi. Mengingat ulama adalah sosok yang patut di contoh, termasuk fatwa mengkafirkan atau menyesatkan sebuah mazhab atau sebuah kaum, bila ulamanya sudah mengeluarkan pendapat maka harus dipatuhi.

Kepatuhan yang sangat berlebihan pada sosok ulama selain berbagai alasan telah disebutkan di atas juga dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang agama. Dalam tradisi dayah salafi mempelajari ilmu selain di lembaga dayah merupakan sesuatu yang kurang dianjurkan. Dengan sangat terbatasnya tempat dan media untuk menuntut ilmu menjadikan mereka kurang mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap Islam, sehingga klaim mereka yang paling benar dan di luar dari mereka adalah salah makin terjadi dalam masyarakat.

Dalam fenomena menuntut ilmu juga mengklaim bahwa di dayahnya lebih baik dari dayah lain tentang berbagai kondisi. Hal ini dapat dilihat dari observasi penulis di tempat tinggal penulis ada seorang *teungku* yang sudah jadi panutan dalam masyarakat, ia alumni Dayah Ruhul Fata Seulimum, maka bila ada anak-anak warga yang mau menuntut ilmu ke dayah, maka akan diarahkan ke dayah yang menjadi alumni dari *teungku*, hingga yang terjadi pada sekarang ini ia sudah menjadi imam mesjid di tingkat mukim, maka anak-anak yang

¹¹Wawancara dengan Misbah, salah seorang tokoh agama di Bireun pada tanggal 8 Agustus 2018

akan mengaji ke dayah semua diarahkan pada dayah almamaternya. Sehingga banyak masyarakat belajar di Dayah Ruhul Fata Seulimum karena mematuhi arahan *teungku*.¹²

Fatwa-fatwa ulama ini menjadi fatwa yang mengikat dan di patuhi semuanya karena, mereka masyarakat ada yang belum tahu tentang lembaga ulama yang ada di pemerintahan seperti MPU, karena menurut mereka MPU itu tidak hadir dan tidak ada pada saat dibutuhkan untuk apa dipatuhi. Lembaga MPU pun belum tersosialisasi sampai ke tingkat desa bahwa mereka lembaga yang independen dalam memutuskan masalah agama, tapi di bawah pemerintahan Aceh.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa fakta di atas, bisa disimpulkan bahwa ulama bagi masyarakat Aceh sangat berperan penting dalam semua lini kehidupan termasuk dalam masalah politik. Tidak mengherankan bila dalam masyarakat untuk sekarang ini terbentuk jaringan ulama. Faktor *teungku* dayah masih sangat dipatuhi oleh masyarakat karena mereka hadir dalam berbagai masalah masyarakat. *Teungku* yang akan menyelesaikan semua masalah terutama yang berkaitan dengan agama yang terjadi dalam masyarakat. *Teungku* eksis dalam masyarakat karena mereka hidup berdampingan dengan warga. Ada ketika dibutuhkan dan tidak perlu banyak prosedur untuk bertemu dengan *teungku*.

Bentuk-bentuk jaringan yang terjalin dengan ketokohan ulama dayah adalah mereka terjalin lewat berbagai hal yaitu melalui alumni, melalui jabatan struktural, majelis zikir, tarekat dan lain sebagainya. Berbagai bentuk jaringan yang terjadi dapat mengantarkan posisi *teungku* dayah dalam masyarakat masih sangat berpengaruh, sehingga bukan suatu hal yang aneh sekarang ini masyarakat masih sangat terikat dan sangat patuh dengan apa yang difatwakan ulama dayah. Meskipun di pihak lain ada lembaga MPU yang secara resmi didikan oleh pihak pemerintah dan bertanggung jawab semua masalah keagamaan masyarakat. Namun realitasnya masyarakat masih sangat patuh pihak ulama dayah, hal ini terjadi juga karena pihak MPU kurang tersosialisasi dalam masyarakat tentang keberadaan mereka.

¹² Observasi penulis karena yang terjadi kampung penulis yang terjadi sekarang ini adalah banyaknya anak warga yang menjadi santri di dayah Ruhul Fata Seulimum Aceh Besar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asmanidar. 2010. *Ulama dan Ulee Balang Sebagai Elit Sosial Aceh (1900-1946)*. Tesis. IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Azyumardi Azra. 2005. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Hasbi Amiruddin. 2008. *Menatap Masa Depan Dayah di Aceh*. Yayasan Pena: Banda Aceh
- Husaini Husda. 2010 . Kiprah Ulama Dalam Sejarah Percaturan politik di Aceh”. *Jurnal Adabiya*.
- Inu Kencana. 1999. *Ilmu Politik*. Rineka Cipta: Jakarta
- James L. Peacock. *Indonesia: An Antropological Perspective*. Pacific Palisades, California: Good Year Publishing Company
- James T. Segel. 1969. *The Rope of God*. University of California
- Misri. A. Muchsin. 2003. *Tasauf di Aceh Abad XX: Studi Pemikiran Teungku Abdullah Ujong Rimba (1907-1983)*. Disertasi. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga
- Muhammad AR. 2010. *Akulturası Nilai-Nilai Persaudaraan Islam Model Dayah Aceh*. Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, Kementrian Agama RI
- Snouck Hurgronje. 1985. *Aceh di Mata Kolonialis*. Jakarta: Yayasan Soko Guru,
- T. Ibrahim Alfian. 1987. *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori social*. Yogyakarta: Tiara Wacana